

MOTIF KEPALA SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI SDN PANJUNAN II KALITIDU BOJONEGORO

Dwi Susanti

Program Studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Susanti.dwi55@ymail.com

Ari Wahyudi

Program Studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Ariwahyudi@unesa.ac.id

Abstrak

Banyak permasalahan yang nampak pada dunia pendidikan, terutama pada kebijakan penyelenggaraan sekolah inklusi. Sekolah inklusi sendiri adalah sekolah reguler yang menerima siswa Berkebutuhan khusus dan menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan siswa. Permasalahan yang terjadi saat ini pihak sekolah yang ditunjuk masih tidak optimal dalam menjalankan kebijakan sekolah inklusi. Pelanggaran yang dilakukan salah satunya adalah berkeliaran ketika jam pelajaran dimulai, hal ini menimbulkan kecemburuan pada siswa reguler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan sekolah inklusi di SDN Panjunan II Kalitidu Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan teori Afred Schutz menggunakan metode kualitatif, subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive yaitu Kepala Sekolah. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan cara observasi dan proses wawancara, menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menjelaskan temuan *because motif* kepala sekolah menerima tataran sekolah inklusi karena perintah dari pemerintah dan tidak dapat menolak perintah tersebut, serta penyetaraan semua siswa dapat membantu mewujudkan harapan orangtua, pada temuan *in order to motif* meliputi kepala sekolah berharap mendapatkan dana tambahan, berharap agar di lengkapi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, adanya guru pendamping khusus yang profesional agar kegiatan pembelajaran menjadi optimal, walimurid ikut serta dalam perkembangan siswa ABK kedepan agar tercipta kesetaraan antara siswa reguler dengan ABK.

Kata Kunci: *Pendidikan Inklusi, Kesetaraan, Anak Berkebutuhan Khusus.*

Abstract

Many problems are visible in the world of education, especially in the policy of implementing inclusive schools. Inclusive school itself is a regular school that accepts students with special needs and provides services according to the needs of students. The problems that occur at this time the designated school is still not optimal in running the policy of inclusive school. Violations committed one of them is wandering when the class starts, this gives rise to jealousy in regular students. This study aims to determine the principal's motives in the implementation of inclusion schools in SDN Panjunan II Kalitidu Bojonegoro. This research use the theory of Afred Schutz using qualitative method, research subject chosen menggunakan purposive technique that is Head of School. Data collection in the field was done by observation and interview process, using data analysis from Miles and Huberman. The results of the study explain the findings because the principal's motives accept the inclusion school level because of orders from the government and can not refuse the order, as well as equalization of all students can help realize the expectations of parents, on the findings in order to motives include principals hoping to get additional funds, in the complete needs of school facilities and infrastructure, the presence of a special professional teacher for the learning activities to be optimal, walimurid participate in the future development of students in order to create ABK equality between regular students with ABK.

Keywords: *Education Inclusion, Equality, Children Needs Specifically.*

PENDAHULUAN

Pernyataan Salamanca yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dimana ia berada tanpa memperhatikan berbagai kesulitan dan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Bagian lain dinyatakan pula bahwa

sekolah dengan orientasi inklusif adalah sebuah langkah yang efektif untuk menghilangkan terjadinya sikap-sikap yang diskriminatif, menciptakan masyarakat terbuka, membangun masyarakat yang inklusif dan mampu mencapai pendidikan untuk semua, bahkan akan mampu memberikan pendidikan bagi mayoritas anak serta mampu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan

efektifitas pemanfaatan dana di dalam sebuah sistem pendidikan.

implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380/C.6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif yang menyatakan bahwa penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya empat sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Hal ini dikukuhkan lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (permendiknas nomor 70 tahun 2009).

Menurut Kustawan (2012:7) Pendidikan inklusif secara tradisional dikaitkan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ruang lingkup pendidikan inklusif semakin luas yaitu mencakup anak berbakat atau bertalenta. Sudah terdapat banyak di Kota-kota yang menyelenggarakan sekolah inklusi yang bertujuan untuk menyetarakan semua siswa baik reguler maupun berkebutuhan khusus, namun yang menjadi kendala ataupun keluhan setiap sekolah adalah ketidaktersediaan guru pendamping khusus hal tersebut menjadi masalah dalam berjalannya program sekolah inklusi.

Kecamatan Kalitidu merupakan daerah yang luas, terdapat banyak berbagai macam Sekolah yang menampung masyarakat setempat dan juga mempunyai kualitas yang baik. Diantaranya Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar dan masih banyak lagi. Menurut data dari dinas UPTD Kalitidu di Kecamatan Kalitidu saat ini juga terdapat Sekolah Dasar Negeri yang mendeklarasikan Inklusif terdapat 6 SD Negeri inti yang terdeklarasi inklusif dan 2 yang akan diusulkan. Dari ke enam sekolah yang sudah berlabel inklusif tersebut di Kecamatan Kalitidu hanya terdapat 3 sekolah yang sudah terdapat guru pendamping khusus, untuk 3 lainnya masih belum terdapat guru pendamping khusus salah satunya yang masih belum terdapat guru pendamping khusus adalah SDN Panjunan II Kalitidu ketidaktersediaan sarana prasarana, membuat kegiatan pembelajaran berjalan tidak optimal sehingga banyak yang harus dikorbankan.

Fenomena yang diamati peneliti dalam penyelenggaraan sekolah inklusi di Kalitidu adalah tidak optimalnya proses kegiatan belajar di sekolah tersebut, hal ini mengakibatkan adanya kecemburuan antara siswa reguler dengan siswa ABK. Sekolah tersebut terdapat 3 siswa Berkebutuhan Khusus yang melanggar tata tertib ketika jam pelajaran dimulai, para siswa berkebutuhan khusus tidak mendapat perhatian ketika didalam ruangan kelas, mereka diabaikan begitu saja bahkan tidak ada guru pendamping khusus untuk ABK, sehingga yang terjadi adalah ABK terabaikan. Nor

Normatifnya semua siswa sama seharusnya menaati setiap aturan yang telah dibuat, tidak memandang siswa ABK maupun siswa reguler. Sebagai tataran menerima inklusi, Kepala sekolah juga salah satu tokoh penting yang turut andil dalam pembuatan kebijakan sekolah. Kebijakan tersebut harusnya diterapkan sesuai yang telah

disepakati guna mencapai suatu tujuan bersama, yaitu untuk mengembangkan karakter anak berkebutuhan khusus dan siswa reguler, namun penyelenggaraan sekolah inklusi tidak berjalan dengan baik. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas hal tersebut. Rumusan masalah yakni bagaimana motif Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan sekolah inklusi di SDN Panjunan II Kalitidu. Sedangkan tujuan penelitian untuk memahami because motive dan in order to motive kepala sekolah dalam penyelenggaraan sekolah inklusi di SDN Panjunan II Kalitidu.

Ketidakadaan guru pendamping khusus menjadi sebuah kendala, dikarenakan guru umum yang tidak mempunyai pengalaman sebelumnya, dan juga mempunyai tanggung jawab lain untuk mengajar siswa normal. Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus dengan kemampuan yang terbatas, sehingga hasilnya tidak optimal dan Anak Berkebutuhan Khusus menjadi terbengkalai, menyebabkan ketidakadilan dalam memperoleh hak yang sama dalam menuntut ilmu. Menurut pernyataan Guru yang mengajar saat itu mengapa siswa Berkebutuhan khusus dibiarkan ketika jam pelajaran dikarenakan guru merasa kuwalahan mengatasi siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus, sedangkan siswa Anak Berkebutuhan Khusus sangat sulit untuk diberi arahan, sehingga membuat guru malas dan seperti yang telah dinyatakan bahwa bukan bidangnya untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus.

Sekolah inklusi yang seharusnya menjadi sekolah integrasi, agar tidak ada pembatas antara ABK dengan siswa reguler serta tidak adanya diskriminasi. Semua itu tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Setelah mengetahui permasalahan yang ada di lapangan, terdapat permasalahan yang nampak pada sekolah tersebut dikarenakan siswa normal lainnya dilarang untuk keluar kelas ketika jam pelajaran dimulai, sedangkan untuk ABK mereka dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan maupun tindakan lain dari guru. Aturan-aturan yang telah dibuat di dalam sekolah nampak kacau, ketika siswa ABK dibiarkan tanpa adanya pengendalian maka ketertiban sekolah menjadi tidak karuan.

Penelitian yang membahas mengenai motif kepala sekolah ini akan di gali menggunakan prespektif dari Alfred Schutz Menurut Schutz dalam Kuswarno (2013:13), melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang berbeda diluar individu. Kenyataan sosial tersebut merupakan suatu realitas yang berdiri sendiri diluar sana dan terkadang bisa mempengaruhi individu. Alfred Schutz membuat suatu perbedaan terhadap motif-motif dari sebuah tindakan agar kita bisa memahami suatu tindakan, yaitu: *Because Motive* (Motif Sebab), yaitu dunia kehidupan manusia lebih eksplorasi pengalaman individual pada tataran pemaknaan yang bersifat subjektif, *because motive* pada seseorang yaitu merupakan sebab dari orang tersebut melakukan tindakan pada dasarnya sang actor mempunyai kesadaran atau motif sebab yang mempengaruhi dunia actor tersebut. *In Order Motive* (Motif tujuan), yaitu dunia kehidupan manusia pada tingkat yang lebih kolektif pemaknaan yang berlangsung bersifat Intersubjektif.

Pengalaman ini terjadi dalam hubungan sosialnya yang kompleks dan dipenuhi tindakan sosial antar individu maupun kelompok. Sedangkan motif tujuan merupakan tujuan dari pelaku tersendiri, tujuan dari aktor, seorang aktor dalam melakukan tindakan juga didasari motif tujuan yang pada akhirnya tujuan tersebut merupakan hasil akhir dari aktor melakukan sebuah tindakan. Schutz, menyatakan bahwa tindakan para aktor tidak muncul begitu saja, tetapi ada yang melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan tersebut dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian mengenai perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong, 2014:157). Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan memahami mengenai gambaran suatu peristiwa secara menyeluruh dan mendalam mengenai motif kepala sekolah dalam menyelenggarakan sekolah inklusif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan perspektif Fenomenologi dari Schutz yang mana fenomenologi memahami arti peristiwa atau membongkar secara menyeluruh fenomena dan kaitannya dengan orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa dan situasi – situasi tertentu, untuk itu peneliti menggunakan perspektif dari Alfred Schutz karena menurut peneliti sesuai dengan tujuan dari penelitian peneliti yaitu menggali motif dengan menggunakan perspektif Alfred Schutz. Penelitian ini dilakukan di SDN Panjuran II Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Subjek penelitian yakni kepala sekolah sebagai penerima tataran inklusi serta pembuat kebijakan yang merupakan sumber utama data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan teknik yang bersifat induktif, peneliti juga menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengolah data pertama melakukan pereduksian data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memfokuskan hasil penelitian, selanjutnya dilakukan penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Smith (2014:402) Kepala sekolah merupakan pemimpin yang mempunyai status penting di dalam sekolah. Hal ini dikarenakan kepala sekolah merupakan pengambil kebijakan mengenai menjalankan program-program yang lebih terintegrasi serta mempunyai pengetahuan lebih mengenai menjalankan prosedur

pendidikan khusus. Kepala sekolah yang mempunyai tanggung jawab mengenai berjalannya sekolah inklusi. Berdasarkan data yang sudah di dapat peneliti melakukan langkah analisis dengan menggunakan teori Alfred Schutz yakni because motif dan in order to motif. Hasil Analisis Data Because Motif Sesuai dengan pemahaman mengenai sekolah inklusi yang tercantum dalam Permendiknas Nomer 70 tahun 2009, telah terbagi dalam beberapa hal yakni mengenai peserta didik, penilaian dan sertifikasi, proses pembelajaran, manajemen, penghargaan dan sanksi, dan peran masyarakat. Dalam penjelasan Schutz yang dikutip dari Ritzer menjelaskan bahwa because motif merupakan hal dasar yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu yang merujuk pada masa lalu. (Alfred Schutz dalam Ritzer (2013:59).

Because Motive Kepala Sekolah

Sekolah Inklusi yang telah dijalankan oleh kepala sekolah menurut beliau saat ini sudah ada perkembangan bagi siswa ABK meskipun hanya sedikit, namun untuk segi secara keseluruhan. (Delphie, 2009) sekolah inklusi tidak berkembang. Perkembangan yang lamban bagi peserta didik didasari banyaknya faktor di antaranya sarana dan prasarana yang tidak mendukung, kondisi kelas juga kurang layak, ketidakterediaan guru pendamping kelas dari dinas yang masih menjadi wacana, janji yang tak kunjung dipenuhi oleh pemerintah setempat. Seperti yang telah dituturkan oleh kepala sekolah dimana pihak sekolah tidak cukup mampu dalam mendidik siswa, sebagaimana yang telah dikeluhkan oleh kepala sekolah yang hanya menjalankan program dari kepala sekolah sebelumnya ketika masih belum menjadi sekolah inklusi, hingga sampai menerima tataran sekolah inklusi kepala sekolah masih belum mengerti bagaimana memajukan siswa kalau tidak terdapat fasilitas yang menunjang.

Peserta didik hanya diajarkan dengan modal seadanya, teruntuk siswa ABK yang seharusnya memerlukan banyak media untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Ketidakterediaan guru pendamping khusus juga menjadi salah satu faktor penghambat majunya ABK, dan seharusnya untuk lebih diberikan guru pendamping khusus. Sekolah inklusi ini sudah menggunakan kurikulum K13, dalam penuturan kepala sekolah tidak ada perbedaan dengan kurikulum KTSP. Kepala sekolah menegaskan bahwa dengan menggunakan kurikulum K13, pendidik atau guru yang banyak memberikan pelayanan pada ABK. Meskipun guru pendamping kelas tidak mempunyai basic PLB, namun kepala sekolah melimpahkan tanggung jawab pada mereka, padahal guru pendamping kelas hanya sekali dalam mengikuti pelatihan inklusi.

Kepala sekolah juga menegaskan bahwa tenaga pengajar yang mendampingi ABK mempunyai banyak keluhan, mengenai sekolah inklusi tersebut. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga pendidik yang ada di SDN Panjuran II, mereka juga tidak difasilitasi guru pendamping khusus yang menangani ABK hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan belajar mengajar di kelas, dikarenakan guru hanya berfokus

pada salah satu siswa. Guru pendamping khusus sangat dibutuhkan keberadaannya tetapi sampai saat ini pemerintah masih belum memberikan guru pendamping khusus untuk sekolah inklusi, sehingga kepala sekolah melimpahkan semua tanggung jawab pada guru pendamping kelas. Kepala sekolah hanya memasrahkan ABK pada guru pendamping kelas pelayanannya juga diberikan oleh guru pendamping kelas, kepala sekolah tidak mengetahui mengenai pelayanan di kelas, kepala sekolah hanya menerima keluhan dari pendidik. Di dalam kelas ABK tetap mengikuti proses pembelajaran yang ada layaknya siswa normal, perbedaannya siswa ABK hanya pada tingkat kemampuan yang dimilikinya, mereka tidak dituntut seperti siswa reguler. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi kepala sekolah dengan memahami kondisi dari ABK dalam mengikuti proses pembelajaran.

Penilaian untuk ABK di kelas menurut penegasan dari kepala sekolah dalam nilai keseharian sudah dibedakan, tetapi ketika ujian masih belum ada perbedaan soal ujian, antara ABK dengan siswa reguler di samakan soal-soal tersebut. Sehingga kepala sekolah mengeluh, dengan hal tersebut. Kepala sekolah telah membedakan nilai keseharian ABK dengan siswa reguler di dalam raport, ABK diberikan nilai sesuai standart kemampuan yang dimiliki ABK, hal ini bertujuan untuk agar orangtua dari ABK tidak protes dan memahami kondisi dari anaknya bahwa tingkat kognitif ABK dengan siswa reguler berbeda jauh, sehingga mengharuskan pihak sekolah memberikan penilaian yang berbeda antara ABK dengan siswa reguler. Sehingga nilai ABK lebih rendah dari siswa reguler.

Managemen sekolah inklusi yang berada di sekolah tersebut kepala sekolah masih belum mengetahui secara menyeluruh, dikarenakan kepala sekolah hanya mengikuti dan melanjutkan program dari pemimpin sebelumnya. Saat ini kepala sekolah lebih memperhatikan pada kondisi sekolah. Sedangkan untuk ABK dipasrahkan pada guru kelas yang mendampingi kelas 1. Pada proses pendaftaran siswa ditampung semua tidak ada perbedaan antara siswa reguler dengan siswa ABK, namun pihak sekolah hanya menerima siswa yang lambat dalam berfikir. Untuk persyaratan awal pihak siswa atau wali murid hanya menyerahkan ijazah TK dan usia juga tidak kurang dari 7 tahun, dan mengikuti tes IQ.

Keterangan kepala sekolah sampai saat ini pihak sekolah hanya mendapatkan dana pada umumnya, kepala sekolah menegaskan bahwa tidak ada dana tambahan untuk siswa ABK seperti sarana dan prasarana dan guru pendamping khusus juga tidak difasilitasi. Padahal seperti ABK membutuhkan media guna menunjang perkembangannya. Menurut kepala sekolah menerima tataran sekolah inklusi karena memang pada awalnya mereka ditunjuk oleh pemerintah yang di berikan janji-janji namun pada akhirnya janji tersebut tidak terpenuhi sampai sekarang. Menurut kepala sekolah pemerintah hanya menunjuk tanpa member fasilitas sehingga pihak sekolah pun juga kurang siap.

Kepala sekolah menanggapi peran masyarakat dengan keberadaan sekolah inklusi masih belum mempunyai peran banyak, hanya wali murid yang ikut

berpartisipasi dalam memajukan sekolah inklusi. Menurut penuturan kepala sekolah peran orangtua sudah mendukung pihak sekolah dengan memahami kekurangan ABK serta ikhlas dalam mempercayakan anaknya pada pihak sekolah, hal tersebut diwujudkan melalui pemberian sumbangan. Orangtua dari ABK sangat senang anaknya sekolah di SDN Panjunan II, karena sudah tidak dianggap cacat, dan kelas mereka tidak ada perbedaan tidak tercipta tembok, ABK bisa berbaur dengan siswa reguler.

In Order to Motive Sekolah Inklusi

Alfred Schutz juga menjelaskan bahwa In order to motif merupakan harapan dari individu melakukan tindakan tersebut, yang mencakup sekolah inklusi yang dijabarkan dalam pemahaman tentang peserta didik, pendidik, proses pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, manajemen, penghargaan dan sanksi, hingga peran serta masyarakat.

Kepala Sekolah

Kepala sekolah mengharapkan agar siswa ABK seperti siswa reguler bisa berkembang membaca dan menulis. Sebagaimana hal tersebut menjadi pengantar siswa untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi nantinya, tujuannya agar siswa tidak menjadi bahan bully diluar sekolah maupun dimana tempatnya. Sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum K13, K13 diberlakukan untuk seluruh siswa yang terdapat di sekolah tersebut, tidak ada perbedaan antara siswa reguler dengan siswa ABK, harapan kepala sekolah dengan menggunakan K13 siswa lebih mandiri dan terampil. Namun meski demikian pihak sekolah masih belum memberikan kurikulum khusus untuk siswa ABK. Siswa ABK hanya mengikuti kurikulum yang saat ini di terapkan untuk siswa reguler.

Pendidikan yang ada di SDN Panjunan II Kalitidu, semua sekolah juga berkeinginan untuk memajukan siswanya terutama sekolah yang menyandang status inklusi, Pihak sekolah telah menuturkan bahwasannya sangat ingin mengembangkan kemampuan ABK, yakni harapan mereka agar lebih bisa membaca, menulis, dan menghitung. Selain itu kepala sekolah juga menerapkan sikap disiplin harapannya guna ABK dan seluruh siswa lainnya menjadi generasi yang berkarakter, jujur serta disiplin. Untuk saat ini siswa ABK sudah mampu mengaplikasikan nilai karakter tersebut hal tersebut untuk menutupi kekurangan pada bidang akademik. Selain nilai moral kepala sekolah juga menkankan pada potensi anak berkebutuhan khusus seperti menggambar. Kepala sekolah mengharapkan kepada para pendidik agar semangat menjalankan tugas, pendidik dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik pada ABK, dengan mengembangkan pengajaran se inovatif mungkin agar ABK mudah memahami dan juga betah di dalam kelas saat jam kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.

Proses penilaian dan sertifikasi yang di berikan pada siswa-siswi, kepala sekolah berharap adanya perbedaan penilaian antara siswa reguler dengan siswa ABK. Perlunya perbedaan antara keduanya bertujuan agar

tidak ada kecemburuan antar wali murid, agar tidak ada yang tersinggung akan kondisi yang dimiliki anak. Dengan potensi ABK yang berbeda dengan siswa reguler membuat ABK sulit beradaptasi dengan materi yang disampaikan oleh pendidik. Sehingga perlu pembedaan nilai antar keduanya, bagi kepala sekolah pihak sekolah khawatir ketika ujian nasional karena tidak ada pembedaan soal antara siswa ABK dengan siswa Reguler. Kepala sekolah pada pemerintah untuk membedakan soal ujian pada siswa ABK dengan siswa reguler sebagaimana kemampuan yang dimiliki mereka berbeda. Kepala sekolah juga berharap pada pendidik agar maksimal dalam mengembangkan kemampuan siswa ABK meskipun terdapat hambatan yang membuat ruang gerak pendidik terbatas, sejauh ini kepala sekolah juga mengharapkan adanya pembedaan penilaian dari pendidik sendiri untuk siswa ABK.

Manajemen sekolah inklusi dirasa kepala sekolah sudah melakukan yang terbaik sehingga kepala sekolah hanya melanjutkan program sebelumnya, tentu kepala juga mempertimbangkan untuk melakukan usaha yang lebih baik agar sekolah inklusi bertambah maju. Kepala
Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal berharap agar pemerintah memenuhi janji yang dulu, untuk memajukan suatu lembaga negeri tentunya peran pemerintah juga sangat dibutuhkan, seperti pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana. Perlunya sosok guru pendamping khusus menjadi hal yang utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah guna membangun pendidikan serta meringankan beban guru pendamping kelas.

Menerima tataran inklusi memanglah tidak mudah bagi kepala sekolah, sekolah ditunjuk oleh atasan kepala sekolah hanya menyetujui apa yang telah menjadi keputusan pemerintah. Dijadikannya sekolah inklusi merupakan sebuah amanat yang harus dijalankan. Menurut penuturan kepala sekolah pemerintah juga mempunyai tujuan untuk memeratakan, memecah diskriminasi yang ada di lingkungan masyarakat, namun pada kenyataan di lapangan tujuan pemerintah hanya menjadi wacana, karena sekolah yang maju itu harus mendapat perhatian dari pemerintah tidak hanya wacana belaka, tegas kepala sekolah.

Kepala sekolah juga menerima bantuan dari masyarakat terutama pihak wali murid untuk memajukan sekolah inklusi. Kepala sekolah mengharapkan agar wali murid menerima dengan ikhlas kondisi yang dialami ABK, hal tersebut agar menjadikan siswa ABK menjadi individu yang merasa dihargai dan dianggap, selain itu mereka juga akan menjadi lebih baik. Salah satu partisipasi dengan mengajarkan apa yang telah disampaikan pendidik ketika sampai di rumah dengan begitu ABK akan mengalami perkembangan.

PENUTUP

Simpulan

Penyelenggaraan sekolah inklusi yang tidak optimal disebabkan oleh beberapa faktor, kepala sekolah sebagai penerima tataran inklusi menjelaskan bahwa ketidaktersediaan guru pendamping khusus menjadi salah

satu kendala proses kegiatan pembelajaran yang tidak optimal. Selain itu juga sarana dan prasarana yang tidak menunjang juga menghambat kinerja dari pihak sekolah. Tidak adanya peran dari pemerintah mengakibatkan pihak sekolah mengajar ABK dengan modal sumber daya seadanya, oleh sebab itu adanya pengkategorian karena motif dan in order to motif.

Because motif kepala sekolah menerima tataran sekolah inklusi karena perintah dari pemerintah dan tidak dapat menolak perintah tersebut, serta penyetaraan semua siswa dapat membantu mewujudkan harapan orangtua. Sedangkan pada temuan in order to motif meliputi alih-alih kepala sekolah berharap mendapatkan dana tambahan, berharap agar pemerintah segera merealisasi janjinya, melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, adanya guru pendamping khusus yang profesional agar kegiatan pembelajaran menjadi optimal, walimurid ikut serta dalam perkembangan siswa ABK kedepan agar tercipta kesetaraan antara siswa reguler dengan ABK.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan terdapat beberapa saran adalah sebagai berikut; (1) Kepala sekolah mempunyai peran dalam mengembangkan sekolah inklusi dan seharusnya pemerintah juga memfasilitasi sekolah yang telah ditunjuk dengan begitu akan meningkatkan mutu pendidikan terutama untuk sekolah inklusi. (2) Kepala Sekolah SDN Panjuran II agar lebih memperhatikan pembelajaran yang baik untuk ABK sehingga ABK juga berkembang dengan baik dan lebih optimal. (3) Kepala sekolah memberikan saran guru pendamping khusus untuk ABK untuk sementara, dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah. Agar guru kelas berkurang beban dan tanggung jawabnya, selain itu sekolah inklusi akan berjalan dengan baik dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Delphie, Bandi. 2009. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi*. Klaten: PT Intan Sejati.
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: Pt Luxima Metro Media.
- Kuswarno, Engkus. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Bakat Istimewa*. Jakarta : Permendiknas.

Ritzer, George. 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Smith, J David. 2014. *Sekolah Inklusi Konsep dan Penerapan Pembelajaran*. (Penerjemah: Denis, Ny. Enrica) Bandung: Nuansa Cendikia

Sugiyono. 2012. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

